



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

Tahun 2025



**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur**





DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Maksud dan Tujuan.....	I-5
	1.3. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-12
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-16
	2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025.....	II-17
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	III-1
	3.2.1. Program Inovasi Daerah.....	III-3
	3.3. Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
	4.1. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 Melalui APBD II.....	IV-1
	4.2. Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahun 2025 Melalui DAK.....	IV-1



4.3. Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahun 2025 Melalui APBD I dan DABA.....	IV-1
4.4. Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahun 2025 Melalui APBN.....	IV-2
4.5. Usaha Partisipasif (RPK) Tahun 202.....	IV-2
 BAB IV PENUTUP.....	 V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur..... II-3

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur..... II-14

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur..... II-18

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 Kabupaten Belitung Timur..... III-5

Tabel 4.1

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 melalui APBD II..... IV-3

Tabel 4.2

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 melalui DAK..... IV-9

Tabel 4.3

Usulan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 melalui APBD I..... IV-11

Tabel 4.4

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 melalui APBN..... IV-12

Tabel 4.5

Usulan Partisipasif (RPK) Tahun 2025..... IV-13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	1-2
--	-----



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan rangkaian dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Manggar, 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005

BAB I PENDAHULUAN

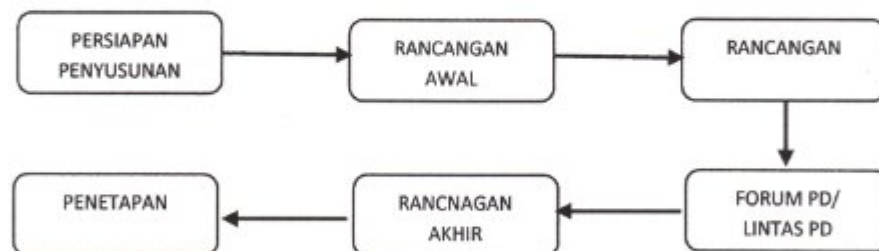
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025 melalui tahapan-tahapan:

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja PD



Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2012 Nomor 17);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114)
26. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20); dan
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15).

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

1. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 secara sistematis dan terorganisir;



2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).



- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

Lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 bersumber dari hasil Evaluasi pelaksanaan rencana kerja urusan Penanaman modal, urusan perdagangan dan urusan perindustrian tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Urusan Perdagangan dan Perindustrian masih ditampilkan dikarenakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur baru terbentuk di triwulan IV tahun 2023, sehingga capaian urusan perdagangan dan perindustrian triwulan I sampai dengan triwulan III masih tergambar di evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023. Berikut gambaran hasil evaluasi pelaksanaan rencana



kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 :

1. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 melaksanakan 13 Program, 22 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, yang terbagi dalam 3 urusan dan 1 urusan penunjang. Ketiga urusan tersebut adalah penanaman modal, perdagangan dan perindustrian. Pada triwulan IV tahun 2023 dilakukan perubahan nomenklatur dan pemisahan urusan sehingga hanya mengampu urusan Penanaman Modal, sedangkan data urusan perdagangan dan perindustrian yang masih tergambar dalam Evaluasi renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 hanya digunakan sebagai informasi realisasi sampai dengan triwulan ketiga saja.
2. Pencapaian realisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur pada Triwulan IV tahun 2023 untuk realisasi capaian kinerja sebesar 93,17 persen dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 92,07 Persen dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Untuk alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 12.093.138.400 dapat direalisasikan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 11.134.396.152,-. Untuk urusan penanaman modal capaian realisasi tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.011.636.200,- dengan realisasi sebesar Rp 853.833.937,- atau sebesar 84,40 persen

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	82 persen	91,7 persen	73 persen	92,31 persen	126,45	76 persen	- persen	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	- persen	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	- Dokumen	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	- persen	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang	32 Orang	36 Orang	35 Orang	97	36 Orang	- Orang	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	83 persen	75 persen	77 persen	77 persen	100	79 persen	- persen	-



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	- paket	1 paket	1 paket	100	paket	paket	-
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	-						
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	3 Orang	4 Orang	2 Orang	50	8 Orang	Orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	90 persen	79,72 persen	82,5 persen	82,5 persen	100	85 persen	- persen	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 paket	Na paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	- paket	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 paket	Na paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	- paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 paket	Na paket	9 paket	9 paket	100	9 paket	- paket	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket	Na paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	- paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48 paket	Na paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	- paket	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	- dokumen	
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	32 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	- laporan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 laporan	85 laporan	76 laporan	76 laporan	100	68 laporan	- laporan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	70 persen	50 persen	55 persen	55 persen	100	60 persen	- persen	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	23 unit	13 unit	9 unit	69	13 unit	- unit	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Na unit	1 unit	1 unit	100	unit	unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	7	Na						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Na						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	95 persen	83 persen	85 persen	85 persen	100	88 persen	- persen	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	- laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100	12 laporan	- laporan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	- laporan	



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	97 persen	90 persen	92 persen	92 persen	100	94 persen	- persen	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	- unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	4 unit	3 unit	1 unit	33	3 unit	- unit	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 unit	38 unit	50 unit	40 unit	80	50 unit	- unit	
	PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,7 persen	60 persen	66,7 persen	60 persen	90,00	66,67 persen	- persen	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	2 kebijakan	3 kebijakan	2 kebijakan	2 kebijakan	100	2 kebijakan	- kebijakan	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan usaha	Na kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	1 kegiatan usaha	100	1 kegiatan usaha	- kegiatan usaha	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	80 persen	80	100 persen	- persen	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	- dokumen	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2 Investor	37 Investor	2 Investor	54 Investor	2700,00	2 Investor	- Investor	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	100,00	4 sektor	- sektor	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	- dokumen	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kab/ Kota	2 dokumen					1 dokumen	dokumen	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	84 persen	84,55 persen	84 persen	94,7 persen	112,74	84,5 persen	- persen	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	9 persen	- 16,52 persen	9 persen	69,68 persen	774	10 persen	- persen	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 pelaku usaha	Na pelaku usaha	800 pelaku usaha	1.866 pelaku usaha	233	175 pelaku usaha	- pelaku usaha	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	19 investor	34 investor	19 investor	62 investor	326,32	20 investor	- investor	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	7,5 persen	49,46 persen	7,5 persen	48,61 persen	648,13	8 persen	- persen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 kegiatan usaha	Na kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	100	12 kegiatan usaha	- kegiatan usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha	Na pelaku usaha	200 pelaku usaha	208 pelaku usaha	104	216 pelaku usaha	pelaku usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 kegiatan usaha	Na kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	100	65 kegiatan usaha	- kegiatan usaha	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	63,6 persen	85,71 persen	63,6 persen	85,71 persen	134,68	72,73 persen	- persen	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tri Wulan I (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	90 persen	93,93 persen	90 persen	87,5 persen	97,22	90,5 persen	- persen	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	- dokumen	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Penanaman modal baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat dan menciptakan operasionalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil;
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Upaya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas, sebagai berikut:

1. Terlaksananya koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Terlaksananya kegiatan inovasi "KIK MERAN" (keliling Kampong Melayani Perizinan).
3. Terlaksananya pelayanan pendampingan dengan membuka Pojok Layanan Mandiri dan Pojok OSS yang bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.
4. Terlaksananya koordiansi dengan pelaku usaha besar dalam rangka fasilitasi kemitraan usaha pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.



5. Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan dengan pelaku usaha terkait perizinan dan tatacara pelaporan LKPM serta memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong yang mengampu urusan Penanaman modal diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Perubahan 2021-2026. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Indikator Renstra Perubahan 2021-2026														
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik			53	54	60	67	73	73,83	78,73	94,35	Na	73	Realisasi tahun 2024 belum tersedia karena data bersifat tahunan
1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	85,33 = B	86,78 = B	Na	65-76,60 = C	
1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	BB > 70-80	63,08 = B	71,72 BB	72,51 = BB	Na	BB > 70-80	
1.3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	81,5 (kualitas tinggi)	94,53 (kualitas Tertinggi)	Na	Sedang	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	3	2,15	2,7	3,56	Na	3	
2.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	72,00 persen	83,33persen	100 persen	100 persen	Na	72,00 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMON)			359,057 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466 juta rupiah	402,814 juta rupiah	472,466 juta rupiah	1.373,500 juta rupiah	616.140 juta rupiah	Na	402,814 juta rupiah	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
3.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	11,80 persen	64,84 persen	22,67 persen	32,80 persen	Na	11,80 persen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya:

1. Kurang lengkapnya data dan informasi yang di sajikan dalam sebuah project peluang investasi
2. Kurang optimalnya promosi potensi investasinyang dilakukan
3. Kurangnya regulasi tentang kebijakan daerah yang mengatur strategi promosi yang berlandaskan asas kepastian hukum dan berkelanjutan seperti Kawasan Industri atau kawasan ekonomi khusus
4. Kurang/rendahnya minat investor yang ingin berinvestasi terhadap sector-sektor peluang investasi yang ditawarkan di daerah
5. Kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi di urusan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
6. Belum meratanya kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha) pelaku usaha
7. Perlunya penyesuaian peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu akibat adanya perubahan nomenklatur nama perangkat daerah.
8. Belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) baik fisik maupun digital di Belitung Timur yaitu merupakan penintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Sedangkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tantangan

1. Meningkatkan investasi yang masuk di Kabupaten Belitung Timur
2. Meningkatkan Fasilitasi kerjasama kemitraan pelaku usaha kecil dan menengah dengan investor / pelaku usaha
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin dan pemenuhan komitmen.
4. Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Belitung Timur.
5. Menyediakan data dan informasi perizinan secara terintegrasi.



6. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitong Timur.

Peluang

1. Selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun stakeholder terkait
2. Adanya anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya komitmen SDM yang tersedia yang mampu melaksanakan tugas dengan baik
4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 adalah **"Memperkuat Daya Saing Daerah dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** dengan 7 prioritas pembangunan daerah :

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pendidikan kesetaraan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pengentasan kemiskinan
4. Optimalisasi peningkatan daya saing dan percepatan investasi
5. Peningkatan kualitas infrastruktur
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur mendukung pencapaian prioritas nomor 4 yaitu optimalisasi peningkatan daya saing dan percepatan investasi

Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program , kegiatan dan sub kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD, maupun DAK berikut pendanaan indikatif.



Berikut dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
URUSAN PENUNJANG				6.984.244.340					6.706.375.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	79 Persen	6.984.244.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	79 Persen	6.706.375.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100 Persen	6.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	100 Persen	6.500.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Belitim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	6.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Belitim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	6.500.600	penyesuaian kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	4.154.125.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)	100	4.896.178.900	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Belitim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	41 Orang/bulan	4.154.125.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Belitim	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	50 Orang/bulan	4.896.178.900	penyesuaian kebutuhan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	81 Persen	42.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	81 Persen	38.600.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Belitim	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab Belitim	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		-	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab Belitim, Luar daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	14.600.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab Belitim, Luar daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			penyesuaian kebutuhan



RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Belitim, Luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5 orang	27.600.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Belitim, Luar daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7 orang	38.600.000	penyesuaian kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	87,50 Persen	642.381.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	87,50 Persen	537.502.100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4 paket	15.340.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4 paket	15.338.800	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	99.999.900	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Belitim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	9 paket	31.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Belitim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	9 paket	31.398.000	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	10 paket	36.949.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Belitim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	10 paket	36.944.400	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Belitim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	9 paket	48.857.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Belitim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	9 paket	48.846.000	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Belitim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	2 Dokumen	4.860.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Belitim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)			Penyesuaian surat edaran
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Belitim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 laporan	4.975.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Belitim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 laporan	4.975.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	70 laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	70 laporan	300.000.000	penyesuaian kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	65 Persen	1.373.520.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	65 Persen	246.154.200	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Belitim	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1.203.120.600	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Belitim	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			Pembangunan gedung MPP baru di tunda
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Belitim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13 Unit	170.400.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Belitim	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	48 Unit	246.154.200	penyesuaian kebutuhan
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab belitim	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab belitim	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	91 Persen	472.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)	91 Persen	521.017.200	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat		-	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	166.660.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	216.020.000	penyesuaian kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	305.480.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Belitim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	304.997.200	penyesuaian kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	95 Persen	293.377.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	95 Persen	460.422.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Belitim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11 unit	164.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Belitim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11 unit	162.310.000	penyesuaian kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Belitim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 unit	105.757.740	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Belitim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	3 unit	274.932.000	penyesuaian kebutuhan



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	36 unit	23.620.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	34 unit	23.180.000	penyesuaian kebutuhan
URUSAN PENANAMAN MODAL				1.632.315.400	URUSAN PENANAMAN MODAL				1.457.845.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100 Persen	97.077.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	1 kebijak an	50.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)	1 kebijak an	32.379.000	
Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Kab Beltim	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokum en	50.000.000	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Kab Beltim	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokum en	32.379.000	penyesuaian kebutuhan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	100 Persen	100.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)	100 Persen	64.698.000	
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab Beltim	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi invetasi	1 Daerah	100.000.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab Beltim	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi invetasi	1 Daerah	64.698.000	penyesuaian kebutuhan
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	54 investor	189.401.900	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi (Investor)	54 investor	189.398.700	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4 sektor	189.401.900	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)	4 sektor	189.398.700	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokum en	189.401.900	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	1 Dokum en	189.398.700	penyesuaian kebutuhan



RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	94,7 Persen	588.785.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	94,7 Persen	468.939.600	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	11 Persen	588.785.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)	11 Persen	468.939.600	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Belitim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	1000 pelaku usaha	550.725.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Belitim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	1000 pelaku usaha	438.309.600	penyesuaian kebutuhan
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab Belitim	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	60 kegiatan usaha	38.060.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab Belitim	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	60 kegiatan usaha	30.630.000	penyesuaian kebutuhan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	62 investor	686.735.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	62 investor	686.483.100	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	8,5 Persen	686.735.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)	8,5 Persen	686.483.100	
Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab Belitim	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	12 kegiatan usaha	66.440.500	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab Belitim	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	12 kegiatan usaha	97.618.000	penyesuaian kebutuhan



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat. Penting
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Lokasi	Indikator	Target	Pagu (Rp)	
Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Kab Belitung	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)	300 Pelaku Usaha	405.144.000	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Kab Belitung	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)	300 Pelaku Usaha	403.624.100	penyesuaian kebutuhan
Pengawasan Penanaman Modal	Kab Belitung	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha)	75 kegiatan usaha	215.151.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab Belitung	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha)	75 kegiatan usaha	185.241.000	penyesuaian kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	85,71 Persen	17.393.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	81,82 Persen	15.946.600	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	91 Persen	17.393.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)	91 Persen	15.946.600	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Belitung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	12 Dokumen	17.393.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Belitung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	12 Dokumen	15.946.600	penyesuaian kebutuhan
Jumlah				8.616.559.740	Jumlah				8.164.220.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tidak memiliki usulan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan baik usulan aspiratif masyarakat melalui forum musrenbang maupun usulan aspiratif yang berasal dari pokir.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Tema RKP 2025 **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2025 dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang menangani urusan penanaman modal adalah Ekonomi Inklusi dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja



Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis perubahan perangkat daerah periode 2021-2026 guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur untuk mencapai visi Kabupaten Belitung Timur untuk periode tahun 2021-2026 yaitu **"Belitung Timur Bangkit dan Berdaya"**.

Untuk misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur mendukung misi I (satu) dan misi II (dua) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Untuk mendukung misi I : **Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur:

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Sasaran :

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Untuk mendukung misi II : **Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur :

Tujuan:

- Meningkatnya investasi;

Sasaran :

- Meningkatkan investor yang berinvestasi;



3.2.1 Program Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal berperan dalam inovasi daerah LAWANG BELTIM. Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek

Inovasi lainnya yang masih akan dilakukan pada tahun 2025 oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah melanjutkan pelaksanaan inovasi **KIK MERAN (Keliling Kampong Melayani Perizinan)** dan **KLINIK LKPM** yang sudah berjalan pada tahun 2023 dan 2024. Inovasi KIK MERAN (yaitu inovasi yang akan dilakukan oleh bidang perizinan keliling untuk melayani pelaku usaha (UMKM) dalam pembuatan NIB dan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan. Sasaran dari inovasi KIK MERAN adalah para pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha berbasis OSS RBA dan pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan maupun non perizinan. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam pengurusan izin.

Klinik LKPM dibuat dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha serta untuk optimalisasi capaian target realisasi investasi yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Klinik Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) diharapkan dapat menjadi wadah untuk membantu pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan LKPM online secara berkala karena pada perkembangannya dalam penyampaian LKPM para pelaku usaha sering menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan laporan LKPM tersebut tidak tersampaikan.



Pada tahun 2025 inovasi baru yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah **inovasi PELATARAN SAMAK (Pelayanan terpadu tepat sasaran Bersama Kecamatan)**. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan satu atap, dan mendekatkan pelayanan Publik ke masyarakat dan inovasi ini adalah implementasi pelaksanaan MPP dengan cara bergerak dengan melibatkan seluruh unit pelayanan yang akan menjadi bagian dari MPP, dengan cara membuka layanan di Gedung pertemuan di 7 kecamatan dengan waktu yang dijadwalkan

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitung Timur.

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan untuk pencapaian misi Kabupaten Belitung Timur, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Penunjang

Terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 6.706.375.000,- Anggaran bersumber dari APBD.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Penanaman Modal terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan total pagu usulan indikatif sebesar Rp 1.457.845.000,- yang bersumber dari APBD dan Alokasi Khusus (DAK) berupa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan asumsi sama dengan yang diterima di tahun 2024 sebesar Rp 618.006.000,-

Jumlah seluruh anggaran pada rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur Tahun 2025 sebesar Rp 8.164.220.000,-

Berikut disajikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitong Timur
Tahun 2025
Kabupaten Belitong Timur

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
URUSAN PENUNJANG					6.706.375.000				11.581.738.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		92	6.706.375.000			82	11.581.738.000
01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		100	6.500.600			100	25.000.000
01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Beltim	4	6.500.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		4	25.000.000
01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		100	4.896.178.900			100	8.608.238.000
01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Beltim	50	4.896.178.900	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		36	8.608.238.000
01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		81,0	38.600.000			83	181.000.000
01. 05. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Beltim		-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	76.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 05. 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Beltim			Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	40.000.000
01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Kab. Beltim	7	38.600.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		7	65.000.000
01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		87,50	537.502.100			90	967.500.000
01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	4	15.338.800	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		11	28.000.000
01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	12	99.999.900	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		11	110.000.000
01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	Kab. Beltim	9	31.398.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		9	47.000.000
01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	10	36.944.400	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	35.000.000
01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kab. Beltim	9	48.846.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	85.000.000
01. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Kab. Beltim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	7.500.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Kab. Beltim	4	4.975.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		8	5.000.000
01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Luar Daerah	55	300.000.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		68	650.000.000
01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		65	246.154.200			70	390.000.000
01. 07. 02	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Beltim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum	Rencana pengadaan gedung MPP	3	-
01. 07. 09	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Beltim	48	246.154.200	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	190.000.000
01. 07. 10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Beltim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		15	200.000.000
01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		91	521.017.200			95	785.000.000
01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (laporan)	Kab. Beltim		-				255.000.000
01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kab. Beltim	12	216.020.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	140.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 08. 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kab. Beltim	12	304.997.200	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	390.000.000
01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		95	460.422.000			97	625.000.000
01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kab. Beltim	11	162.310.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		20	355.000.000
01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Beltim	3	274.932.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		3	235.000.000
01. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Beltim	34	23.180.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	35.000.000
URUSAN PENANAMAN MODAL					1.457.845.000				1.565.344.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)		100	97.077.000			100	50.000.000
02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		1	32.379.000			3	-



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
02. 01. 01	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Beltim	10	32.379.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	-
02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)		100	64.698.000			100	50.000.000
02. 02. 02	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi invetasi	Kab. Beltim	1	64.698.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)		54	189.398.700			2	500.000.000
03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		4	189.398.700			4	500.000.000
03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	Luar Daerah	1	189.398.700	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	500.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)		94,7	468.939.600			86	371.913.000
04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)		29	468.939.600			12	371.913.000



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Kab. Beltim	1000	438.309.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum	ada mobil operasional keliling perizinan senilai Rp 500 jt	175	351.913.000
04. 01. 02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	60	30.630.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	20.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		62	686.483.100			22	583.431.000
05. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		30	686.483.100			9	583.431.000
05. 01. 01	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	Kab. Beltim	12	97.618.000	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	140.000.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
05. 01. 02	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)	Kab. Beltim	300	403.624.100	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		200	218.431.000
05. 01. 03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha)	Kab. Beltim	75	185.241.000	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		50	225.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)		81,82	15.946.600			100	60.000.000
06. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)		91	15.946.600			91,3	60.000.000
06. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	Kab. Beltim	12	15.946.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	60.000.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
JUMLAH SELURUHNYA					8.164.220.000				13.147.082.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitong Timur berdasarkan sumber dana dan usulan akan diuraikan sebagai berikut:

4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBD II

Rencana kerja program dan kegiatan yang sumber dana berasal dari murni APBD II dapat dilihat pada tabel 4.1. Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2025 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 7.546.374.000,- dari seluruh anggaran sebesar Rp 8.164.220.000,-

Pada Bab ini juga disajikan Tabel Rencana Kerja tahun 2025 yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). (lampiran)

Urusan penanaman modal terdiri dari 5 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan total usulan pagu yang bersumber dari APBD sebesar Rp 839.999.000,- dengan lokasi persebaran kegiatan di kabupaten Belitong Timur dan sebagian Luar Daerah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Penanaman Modal.

4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui DAK

DAK Non fisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitas penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Rencana kerja program dan kegiatan yang sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024 diasumsikan sama dengan tahun 2024 sejumlah Rp 618.006.000,- dapat dilihat di tabel 4.2

Rencana tersebut berupa DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal akan digunakan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanaman modal

4.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBD I dan DABA

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitong Timur tidak mengusulkan dikarenakan dari Provinsi tidak ada rencana DABA urusan penanaman modal, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3



4.4 Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tidak mengusulkan rencana kerja menggunakan APBN. Dapat dilihat pada tabel 4.4

4.5 Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2025

Usulan partisipatif masyarakat untuk tahun 2025 pada rencana kerja urusan Penanaman modal tidak ada usulan.



Tabel 4.1
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBD II

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
URUSAN PENUNJANG					6.706.375.000				11.581.738.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)		92	6.706.375.000			82	11.581.738.000
01. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		100	6.500.600			100	25.000.000
01. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kab. Belitung	4	6.500.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		4	25.000.000
01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		100	4.896.178.900			100	8.608.238.000
01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kab. Belitung	50	4.896.178.900	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		36	8.608.238.000
01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		81,0	38.600.000			83	181.000.000
01. 05. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Belitung			Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	76.000.000
01. 05. 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Belitung			Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	40.000.000
01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Kab. Belitung	7	38.600.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		7	65.000.000



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		87,50	537.502.100			90	967.500.000
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Belitim	4	15.338.800	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		11	28.000.000
01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	Kab. Belitim	12	99.999.900	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		11	110.000.000
01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	Kab. Belitim	9	31.398.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		9	47.000.000
01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kab. Belitim	10	36.944.400	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	35.000.000
01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kab. Belitim	9	48.846.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	85.000.000
01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	Kab. Belitim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	7.500.000
01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Kab. Belitim	4	4.975.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		8	5.000.000
01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Luar Daerah	55	300.000.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		68	650.000.000
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		65	246.154.200			70	390.000.000
01.07.02	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Belitim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum	Rencana pengadaan gedung MPP	3	-



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA
2025**

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
01. 07. 09	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Belitim	48	246.154.200	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	190.000.000
01. 07. 10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Belitim	0	-	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		15	200.000.000
01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		91	521.017.200			95	785.000.000
01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (laporan)	Kab. Belitim		-				255.000.000
01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kab. Belitim	12	216.020.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	140.000.000
01. 08. 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kab. Belitim	12	304.997.200	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	390.000.000
01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)		95	460.422.000			97	625.000.000
01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kab. Belitim	11	162.310.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		20	355.000.000
01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Belitim	3	274.932.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		3	235.000.000
01. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Kab. Belitim	34	23.180.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	35.000.000
URUSAN PENANAMAN MODAL					839.999.000				1.565.344.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)		100	97.077.000			100	50.000.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
02. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		1	32.379.000			3	-
02. 01. 01	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Belitung	10	32.379.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	-
02. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia (Persen)		100	64.698.000			100	50.000.000
02. 02. 02	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi invetasi	Kab. Belitung	1	64.698.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)		54	189.398.700			2	500.000.000
03. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		4	189.398.700			4	500.000.000
03. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	Luar Daerah	1	189.398.700	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		2	500.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)		94,7	468.939.600			86	371.913.000
04. 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (Persen)		29	468.939.600			12	371.913.000
04. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (pelaku usaha)	Kab. Belitung	1000	438.309.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum	ada mobil operasional keliling perizinan senilai Rp 500 jt	175	351.913.000



Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2025
04.01.02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	Kab. Beltim	60	30.630.000	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	20.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		62	68.637.100			22	583.431.000
05.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		30	68.637.100			9	583.431.000
05.01.01	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Kegiatan Usaha)	Kab. Beltim		4.918.000	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		10	140.000.000
05.01.02	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (Pelaku Usaha)	Kab. Beltim	300	63.719.100	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		200	218.431.000
05.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (Kegiatan Usaha)	Kab. Beltim		-	DAK dan Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		50	225.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)		81,82	15.946.600			100	60.000.000
06.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (Persen)		91	15.946.600			91,3	60.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

RENCANA KERJA
2025

Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Kinerja	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET RENSTRA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF RENSTRA 2026
06.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	Kab. Belitim	12	15.946.600	Dana Transfer Umum_Dana Alokasi Umum		12	60.000.000
JUMLAH SELURUHNYA					7.546.374.000				13.147.082.000



Tabel 4.2
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui DAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Nilai Rincian Kegiatan
DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal									
2 18 05 2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)		62 investor					
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (Persen)		8,5 persen					
2 18 05.01 01	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Beltim dan Luar Daerah	12 kegiatan usaha	Identifikasi, penyelesaian dan evaluasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Kab Beltim	12	perusahaan	92.700.000
2 18 05 01 02	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Beltim	300 kegiatan usaha	Bimbingan Teknis di Bidang Penanaman Modal	Kab Beltim	300	perusahaan	339.905.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rincian Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Nilai Rincian Kegiatan
2 18 05 01 03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kab. Belitim	75 kegiatan usaha	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Belitim	75	perusahaan	185.401.000
Jumlah Usulan DAK Non Fisik									618.006.000



Tabel 4.3
Usulan Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBD I

No	Perangkat Daerah Provinsi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Output	Lokasi	
						Kecamatan/ kelurahan/desa	Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN PENANAMAN MODAL							
	---	---	---	---	---	---	---



Tabel 4.4
Rencana Kerja Program dan Kegiatan tahun 2025 melalui APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN								
	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL								
TOTAL						-			



Tabel 4.5
Usulan Partisipatif (RPK) Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pekerjaan			Lokasi Pekerjaan		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Pendanaan	Status Usulan
	Uraian	Satuan	Target	Kec	Desa			(Diterima/ Ditolak/ Ditunda)
URUSAN PENANAMAN MODAL								



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur mempedomani Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitong Timur. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur ini dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur.



Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatnya investasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, 10 Juli 2024

Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST

NIP 19750821 200212 1 005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						8.164.220.000,00							13.147.982.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.864.220.000,00							12.242.982.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.864.220.000,00							12.242.982.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 Person			79 Person	6.406.375.000,00						79 Person	10.676.738.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	-			100 Person	6.500.000,00			-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	-			100 Person	4.896.173.900,00			-	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	-	8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	4.896.173.900,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		8.608.238.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase operator yang berkinerja baik	-			81 Persen	38.600.000,00			-	Pembangu- nan Ekonomi 1. Peningka- tan Tata Kelola Pem- erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday- aan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	-	181.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Belflung Timur, Menggar, Semua Kali Desa	-	-	Pembangu- nan Ekonomi 1. Peningka- tan Tata Kelola Pem- erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday- aan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti/ Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Belflung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu- nan Ekonomi 1. Peningka- tan Tata Kelola Pem- erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday- aan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	38.600.000,00	Kab. Belflung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu- nan Ekonomi 1. Peningka- tan Tata Kelola Pem- erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday- aan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	36.944.400,00	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	48.848.000,00	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Belitang Timur, Manggar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4.975.000,00	Kab. Belitang Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-			55 Persen	246.154.200,00			-	Pembangunan Ekonomi 1, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	-	390.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Ket/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48 Unit	246.154.200,00	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Ket/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Ket/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Ekonomi 1, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerespahtaan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	32.379.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu- nan Ekonomi S. Optimali- sasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Meningkatkan investor yang berinvestasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi/ Investasi yang tersedia	-			100 Persen	64.898.000,00			-	Pembangu- nan Ekonomi S. Optimali- sasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Meningkatkan investor yang berinvestasi	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0003		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	64.898.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu- nan Ekonomi S. Optimali- sasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Meningkatkan investor yang berinvestasi		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	54 Investor			54 Investor	189.398.700,00						54 Investor	500.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	-			4 sektor	189.398.700,00			-	Pembangu- nan Ekonomi S. Optimali- sasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Meningkatkan investor yang berinvestasi	-	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	189.398.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu- nan Ekonomi S. Optimali- sasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Meningkatkan investor yang berinvestasi		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,70 Persen			94,70 Persen	458.939.690,00						94,70 Persen	371.913.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						300.000.000,00							905.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	79 Persen			79 Persen	300.000.000,00						79 Persen	905.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	-			87,50 Persen	300.000.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	300.000.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor	-			91 Persen	0,00			-	Pembangu nan Ekonomi 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-	-	255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9 Laporan	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Ekonomi 1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan, Pelayanan Publik dan Pemberday aan Masyarakat	-		255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			J U M L A H					8.164.220.000,00							13.147.882.000,00	



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188. 45-~~754~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 125 huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

**I. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
Kelompok Kerja I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Pokja I
2	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Hukum	Anggota
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum	Anggota
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum	Anggota
10	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Perekonomian dan Pembangunan		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja II
2	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
Kelompok Kerja III Administrasi Umum		
1	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pokja III
2	Kepala Bagian Umum	Anggota
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
4	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
5	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota

II. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		
1.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua Pokja I
2.	Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Muda	Anggota
3.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		
1.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Ketua Pokja II
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

III. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemerintahan		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Auditor Bidang Pemerintahan	Anggota
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Investigasi		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	Ketua Pokja II
2.	Auditor Bidang Investigasi	Anggota
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
1.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Pokja IV

V. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua Pokja I
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Pokja II
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Perekayasa Ahli Muda	Anggota
5.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
6.	Perekayasa Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua Pokja III
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Perekonomian, Sumber daya alam, Infrastruktur dan kewilayahan		
1.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber daya alam, Infrastruktur dan kewilayahan	Ketua Pokja IV
2.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

VI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja I Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
1.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Ketua Pokja I
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan		
1.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Mutasi, Promosi dan Penghargaan	Ketua Pokja II
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota

VII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pembinaan Masyarakat		
1.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & Pendidikan Masyarakat	Ketua Pokja I
2.	Kepala Seksi PAUD	anggota
3.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat & Kursus	anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Sekolah Dasar		
1.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Ketua Pokja II
2.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
3.	Kepala Seksi Program, Data, dan Sarana Prasarana	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Sekolah Menengah Pertama		
1.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua Pokja III
2.	Kepala Seksi Kurikulum	Anggota
3.	Kepala Seksi Kesiswaan & Peningkatan Mutu	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1.	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Ketua Pokja IV
2.	Kepala Seksi PTK PAUD	Anggota
3.	Kepala Seksi PTK SD	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

VIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
4	Kasubbag Keuangan	Anggota
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Kesehatan Masyarakat		
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua Pokja I
2	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Muda	Sekretaris
3	Administrator Kesehatan Muda	Anggota
4	Tenaga Sanitasi Lingkungan Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua Pokja II
2	Epidemiolog Kesehatan Muda	Sekretaris
3	Epidemiolog Kesehatan Muda	Anggota
4	Epidemiolog Kesehatan Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		
1	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua Pokja III
2	Administrator Kesehatan Muda	Sekretaris
3	Administrator Kesehatan Muda	Anggota
4	Administrator Kesehatan Muda	Anggota

IX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan		
1.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Ketua
2.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
4.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
5.	Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Persampahan		
1.	Kepala Bidang Persampahan	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Tata Lingkungan		
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
3.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
4.	Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Anggota

X. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Bina Marga		
1.	Kepala Bidang Bina Marga	Ketua Pokja I
2.	Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Ketua Pokja II
2.	Teknik Pengairan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Cipta Karya		
1.	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua Pokja III
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Penataan Ruang		
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Ketua Pokja IV
2.	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Perumahan dan Permukiman		
1.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	Ketua Pokja V

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja VI Bidang Bina Konstruksi		
1.	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Ketua Pokja VI
2.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota

XI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Anggota
6.	Bendahara	Anggota
7.	Pengadministrasian Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pengelolaan Administrasi Desa		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Desa	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa	Ketua Pokja II
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Anggota
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja III Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Ketua Pokja III
2.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
Kelompok Kerja IV Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga		
1.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga	Ketua Pokja IV
2.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
3.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	Anggota
5.	Pengadministrasian Alat dan obat Kontrasepsi	Anggota

**XII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Penyelenggaraan E-Government		
1.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Ketua Pokja I
2.	Pratama Komputer Ahli Muda	Anggota
3.	Pratama Komputer Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua Pokja II
2.	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
3.	Penyusunan bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik		
1.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian, dan Statistik	Ketua Pokja III
2.	Statistisi Ahli Muda	Anggota

**XIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Lalu Lintas Jalan		
1.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Ketua Pokja I
2.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Anggota
3.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Angkutan Jalan		
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Ketua Pokja II
2.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	Anggota
3.	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan terminal	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pelayaran		
1.	Kepala Bidang Pelayaran	Ketua Pokja III

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	Anggota
3.	Kepala Seksi Kepelabuhan	Anggota

**XIV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
Kelompok Kerja I Bidang Sekretariat		
1.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua Pokja I
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Ketua Pokja II
2.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
3.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Anggota
5.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ketua Pokja III
2.	Kepala UPT Balai Perikanan Budidaya	Anggota
3.	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota
4.	Analisis Benih	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
1.	Kepala Bidang Pengolahan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	Ketua Pokja IV
2.	Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan	Anggota
3.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	Anggota

XV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota
Kelompok Kerja I Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
1.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
3.	Pengelola Kerjasama dan Investasi	Anggota
Kelompok Kerja II Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan		
1.	Penata Perizinan Ahli Muda	Ketua Pokja II
2.	Pengelola Dokumen Perizinan	Anggota
3.	Pengelola Dokumentasi	Anggota
4.	Pengadministrasian Perizinan	Anggota

XVI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perindustrian		
1.	Kepala Bidang Perindustrian	Ketua Pokja I
2.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	
4.	Pembina Industri Ahli Pertama	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perdagangan		
1.	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua Pokja II
2.	Pengawas Kemetrologian	Anggota
3.	Analisis Perdagangan	Anggota
4.	Penera	Anggota
5.	Kepala UPT Pengelola Pasar	

**XVII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Kebudayaan		
1.	Kepala Bidang Kebudayaan	Ketua Pokja I
2.	Pamong Budaya Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata		
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Ketua Pokja II
2.	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Pariwisata	Anggota
4.	Analisis Obyek Wisata	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ketua Pokja III
2.	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Wisata	Anggota
4.	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Anggota

XVIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kassubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Koperasi dan UKM		
1.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua Pokja I
2.	Pengawas Koperasi	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Ketua Pokja II
2.	Instruktur	Anggota
3.	Pengantar Kerja	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek		
1.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek	Ketua Pokja III
2.	Mediator	Anggota

XIX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
5.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua Pokja I
2.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan Sosial		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Ketua Pokja II
Kelompok Kerja III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja V
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV UPT Perlindungan Perempuan dan Anak		
1.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pokja VI

XX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala UPTD Perbenihan	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua Pokja I
2.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
3.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
4.	Pengendali Organisme Pengganggu tanaman	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Perkebunan		
1.	Kepala Bidang Perkebunan	Ketua Pokja II
2.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
3.	Pengendali Organisme Pengganggu tanaman	Anggota
4.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja III Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
1.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pokja III
2.	Medik Veteriner	Anggota
3.	Pengawas Mutu Pakan	Anggota
4.	Pengawas Bibit Ternak	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Ketahanan Pangan		
1.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Ketua Pokja IV
2.	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
3.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
Kelompok Kerja V Bidang Penyuluh Pertanian		
1.	Kepala Bidang Penyuluh Pertanian	Ketua Pokja V
2.	Penyuluh Pertanian	Anggota
3.	Penyuluh Pertanian Kabupaten Wilayah I	Anggota
4.	Koordinator BPP Kecamatan	Anggota

XXI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua Pokja II
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua Pokja III
2.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja IV Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		
1.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua Pokja IV
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

**XXII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Kepemudaan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	Ketua Pokja II
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Penyuluh Olahraga	Anggota
4.	Pengawas Olahraga	
5.	Pengelola Data Seleksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	
Kelompok Kerja III Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana		
1.	Kabid Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Ketua Pokja III
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Analisis Keolahragaan	Anggota

**XXIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Perpustakaan		
1.	Kepala Bidang Perpustakaan	Ketua Pokja I
2.	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Kearsipan		
1.	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua Pokja II
2.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

**XXIV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan	Ketua
2.	Sekretaris Satuan	Sekretaris
3.	Kepala Subbag Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja I
2.	Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	Anggota
3.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah		
1.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	Ketua Pokja II
2.	Kepala Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	Anggota
3.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
1.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua Pokja III
2.	Kepala Seksi Pencegahan, Pemadaman dan Penyelatan	Anggota
3.	Kepala Seksi Sarana Prasarana	Anggota

**XXV. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Arsiparis Mahir	Anggota
Kelompok Kerja I Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama		
1.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Ketua Pokja I
2.	Analisis Wawasan Kebangsaan	Anggota
3.	Administrasi Umum	Anggota
Kelompok Kerja II Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		
1.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketua Pokja II
2.	Administrasi Umum	Anggota
Kelompok Kerja III Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Ketua Pokja III

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
2.	Administrasi Umum	Anggota

XXVI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana	Ketua
2.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
4.	Administrasi Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja Seksi I Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
1.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ketua Pokja I
2.	Analisis Kebencanaan Pertama	Anggota
Kelompok Kerja Seksi II Kedaruratan dan Logistik		
1.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Ketua Pokja II
2.	Penata Penanggulangan Bencana Pertama	Anggota
Kelompok Kerja Seksi III Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Ketua Pokja III
2.	Konselor	Anggota

XXVII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
2.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Anggota

XXVIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Penata Kelola Pemerintahan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Penata Layanan Operasional	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

XXIX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
2.	Pengadministrasi Pemerintahan	Anggota
3.	Pengadministrasi Pertanahan	Anggota
4.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Anggota
3.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
2.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Anggota

XXX. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DAMAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Pengadministrasi Pertanahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Pengolah Data Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Pengolah Data Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja V
2.	Pengolah Data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

**XXXI. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Analisis Desa dan Kelurahan	Anggota
3.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Anggota
4.	Pengadministrasian Pemerintahan	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Penyuluh Keamanan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Anggota
3.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
3.	Pengelola Data	Anggota

**XXXII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPANG PESAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Jabatan Struktural	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja IV Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Jabatan Struktural	Anggota

XXXIII. TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DENDANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua Pokja I
2.	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja II Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua Pokja II
2.	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja III Seksi Kesejahteraan Sosial		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua Pokja III
2.	Jabatan Struktural	Anggota
Kelompok Kerja Seksi IV Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Pokja IV
2.	Jabatan Struktural	Anggota


 BUPATI BELITUNG TIMUR,
 BURHANUDIN